



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Laham bin Ajiremad alias Ajironah, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tengah, 03 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Laham3691@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Suraida binti Ranah, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 05 September 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Suraida@gmail.com, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Mna yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Laham bin Ajiremad alias Ajironah, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Suraida binti Ranah pada tanggal 05 Juni 1993 sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/11/06/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 06 Juni 2023;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Wingki bin Laham NIK 170224110906004 tempat tanggal lahir Sukarami, 11 September 2006 (17 tahun 04 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta berdagang, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

dengan calon istrinya :

Resi Ramadhani binti M.Duyun, NIK 1302124112020002 tempat tanggal lahir Padang, 01 Januari 2002 (21 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Jalan Mansiyang Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Diatas, Kabupaten Solok dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wingki bin Laham beserta calon istrinya yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang bernama Resi Ramadhani binti bahwa anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- 3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wingki bin Laham binti Ilman akan melangsungkan perkawinan dengan Resi Ramadhani binti M.Duyun dikarnakan untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak diinginkan
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (17 tahun 4 bulan) dan (21 tahun 1 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 06/KUA.07.01.10/PW.01/II/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 01 Februari 2024;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Wingki bin Laham) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Resi Ramadhani binti M.Duyun), di KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena untuk menghindari perzinaan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya dan para Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham dan calon istri anak para Pemohon yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon istri anak para Pemohon telah berumur 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun lebih karena tempat kerja keduanya saling berdekatan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Resi Ramadhani binti M.Duyun berumur 21 tahun 2 bulan, sedangkan anak para Pemohon Wingki bin Laham masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Resi Ramadhani binti M.Duyun dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun lebih;
- Bahwa maksud untuk menikahkan Resi Ramadhani binti M.Duyun dan anak para Pemohon karena untuk menghindari perzinahan;
- Bahwa antara Resi Ramadhani binti M.Duyun dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Resi Ramadhani binti M.Duyun telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 1702240306710001 tertanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1702244509750001 tertanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701082811170002 tertanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon Nomor DN-26/D-SMP/K13/3104778 tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 1702-LT-18122017-0205 tertanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon Nomor 1302-LT-20112013-0065 tertanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan anak para Pemohon Nomor 445/29/KEUR/PKM-PB/2024 tertanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon istri anak para Pemohon Nomor 16/SKO/II/2024 tertanggal 03 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paninjawan Kabupaten Solok, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 06/KUA.07.01.10/PW.01/II/2024 tertanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rahmad Pauzan bin Mirhan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku keponakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon Ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham dengan seorang perempuan bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah kenal lama dan dikhawatirkan terjadi perzinahan di antara keduanya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

2. Nita Sari binti Sa'an, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku keponakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham dengan seorang perempuan bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon telah kenal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun lalu dan berdekatan tempat kerja, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinaan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat, hingga dikhawatirkan terjadi perzinaan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham yang berusia 17 tahun 4 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun yang masih berusia 21 tahun 2 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.6 dan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.7 dan P.9 adalah bukti surat asli sehingga tidak perlu dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan para Pemohon a quo secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dengan perkawinan yang tercatat, serta Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, dan di antara anak para Pemohon tersebut adalah Wingki bin Laham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham, lahir tanggal 11 September 2006, yang berarti saat ini baru berumur 17 tahun 4 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menempuh pendidikan terakhir adalah sekolah menengah pertama sebagaimana keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon, terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun, lahir tanggal 01 Januari 2002, yang berarti saat ini telah berumur 21 tahun 2 bulan sehingga dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan anak para Pemohon dan Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan calon istri anak para Pemohon terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat jasmani

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani serta setelah dilakukan pemeriksaan calon istri anak para Pemohon yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun saat ini tidak ada tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Wingki bin Laham masih berumur 17 tahun 4 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon Ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun yang telah berumur 21 tahun

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bulan, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan sehingga dikhawatirkan melakukan perzinaan;
5. Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman terhadap anak maupun para Pemohon terkait permohonan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya;
6. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon istrinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon istrinya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham masih berumur 17 tahun 4 bulan dan calon istri anak para Pemohon yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun telah

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun 2 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak calon mempelai pria yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama dan sedemikian dekat, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Selain itu, oleh karena diketahui bahwa anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri merupakan salah satu petunjuk kesiapan anak para Pemohon guna menjalani kehidupan rumahtangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak laki-laki para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama yang dituju para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya, sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak laki-laki para Pemohon yang bernama Wingki bin Laham untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Resi Ramadhani binti M.Duyun dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Wingki bin Laham** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Resi Ramadhani binti M. Dyun;**
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan secara elektronik oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)